

10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

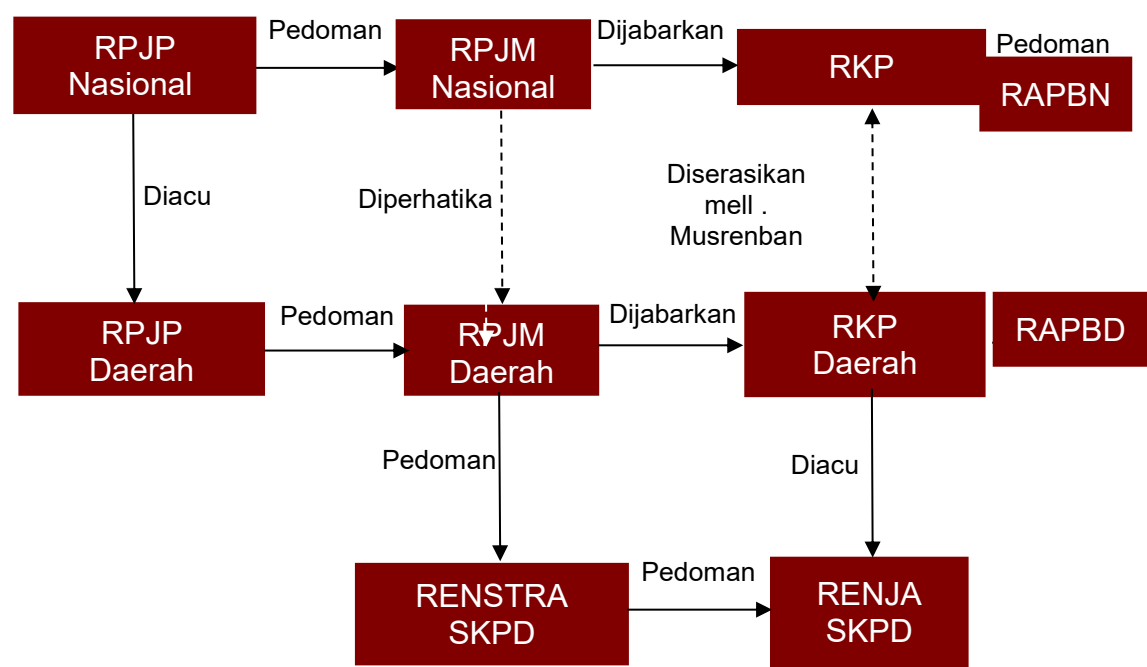
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Dalam penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dijabarkan dalam Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD adalah merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renstra berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan Perda RPJMD, sedangkan salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD adalah Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra PD dengan Renstra KL dan Renstra Provinsi yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Renstra KL dan Renstra Provinsi. Sedangkan Keterkaitan Renstra PD dengan Renja Perangkat Daerah adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja PD tahun berkenaan harus berpedoman dan sesuai pada program kegiatan pada Renstra PD.

Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 adanya beberapa hal sebagai sebagai berikut :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Terbitnya Surat Edaran Kemendagri No. 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes
3. Terbitnya Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

1. Undang – undang No 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);*
3. *Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);*
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);*
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);*
10. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun*

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang *Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kota Blitar No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011- 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026;
36. Peraturan Walikota Blitar No 46 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2021 – 2026
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah sebagai dokumen Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| Bab II | Gambaran Pelayanan perangkat Daerah |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah |
| | 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
| Bab III | Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis |
| Bab IV | Tujuan dan Sasaran |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran menengah Perangkat Daerah |

Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab VI	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 26 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas P3AP2KB Kota Blitar Kota Blitar melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- l. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

- Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas

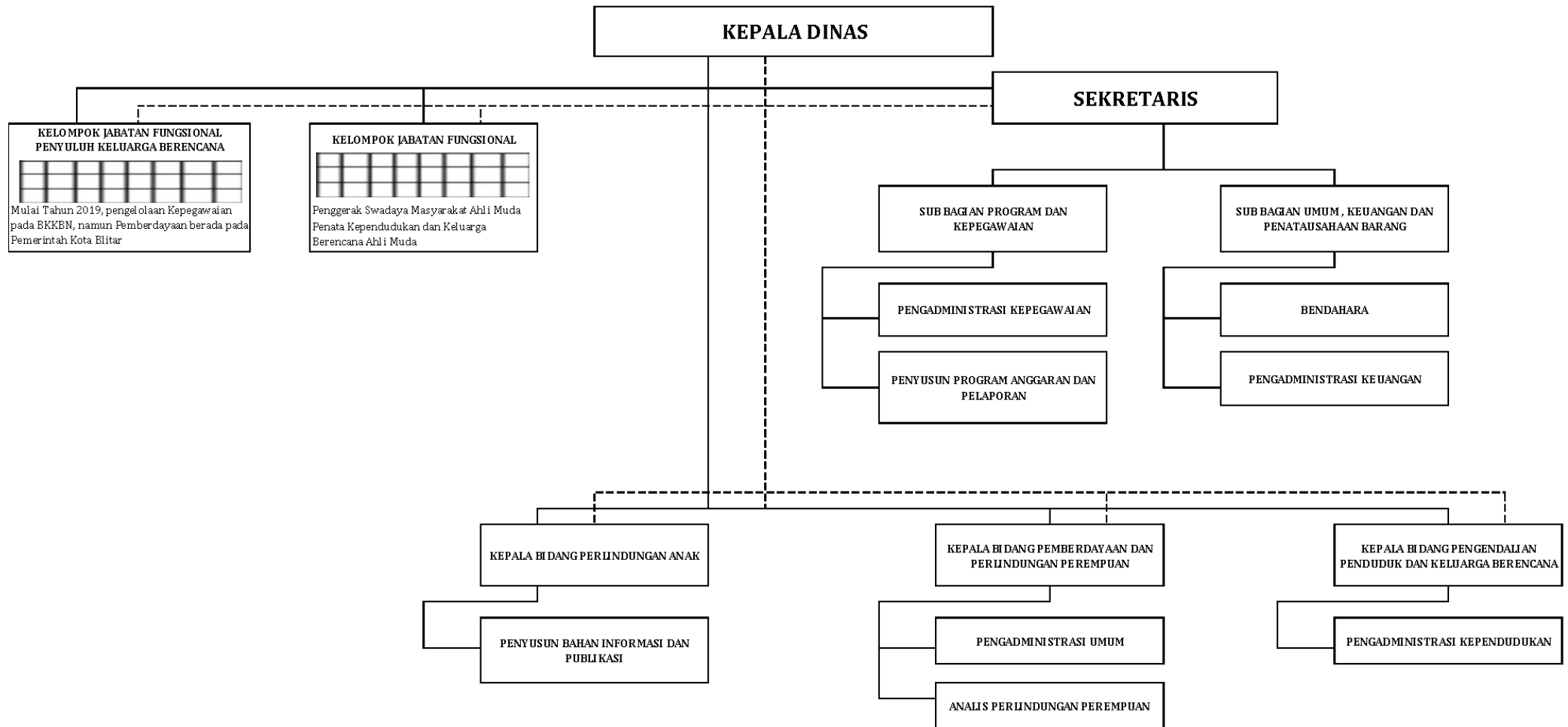
1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.

11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagan 2.2

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



2.3. Sumber Daya Dinas P3AP2KB

a. Sumber Daya Manusia

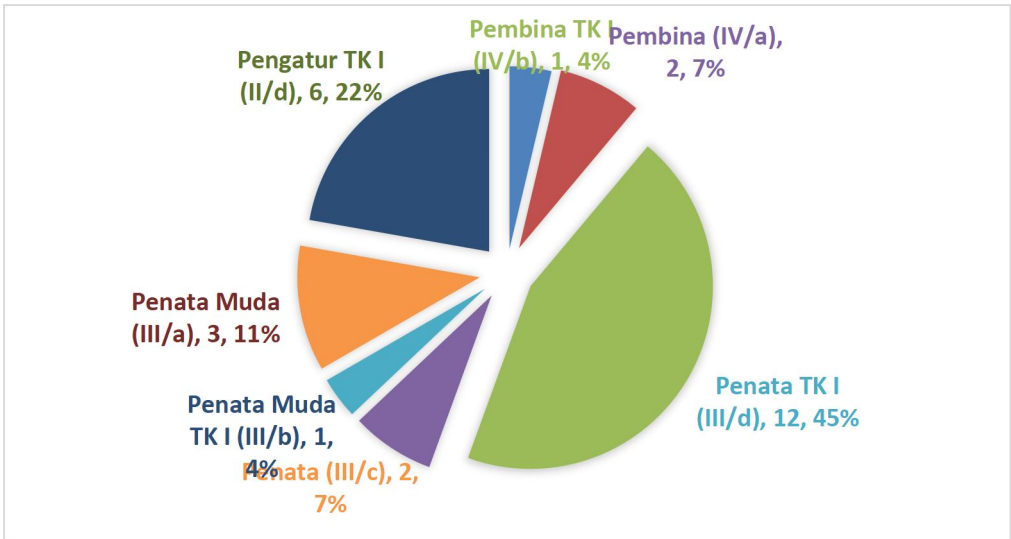
Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 27 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1	
3	Pembina TK I (IV/b)	1	-	1	
4	Pembina (IV/a)	1	2	3	
5	Penata TK I (III/d)	2	8	10	
6	Penata (III/c)	-	1	1	
7	Penata Muda TK I (III/b)	-	-	-	
8	Penata Muda (III/a)	1	2	3	
9	Pengatur TK I (II/d)	2	3	5	
10	Pengatur (II/c)	-	-	-	
11	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-	
12	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	
Jumlah		8	16	24	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2022)

Diagram 2.2.1
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang



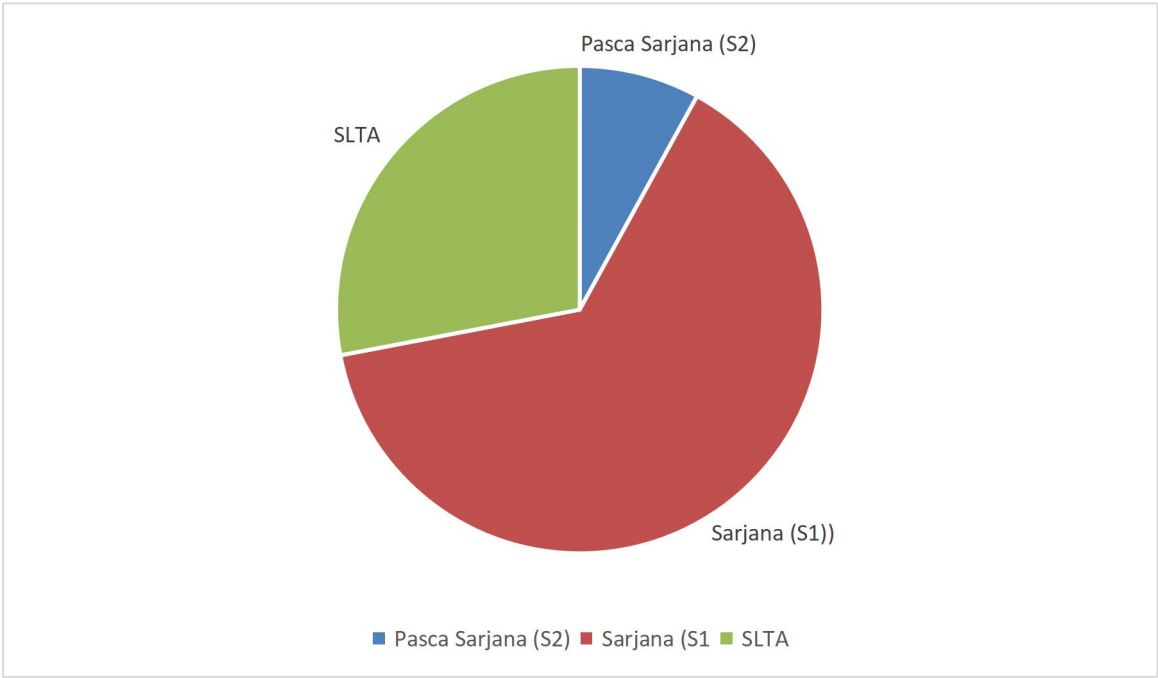
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	1	2	
2	Sarjana (S1)	5	12	17	
3	Diploma	-	-	-	
4	SLTA	2	3	5	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	8	16	24	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2022)

Diagram 2.2.2
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pendidikan



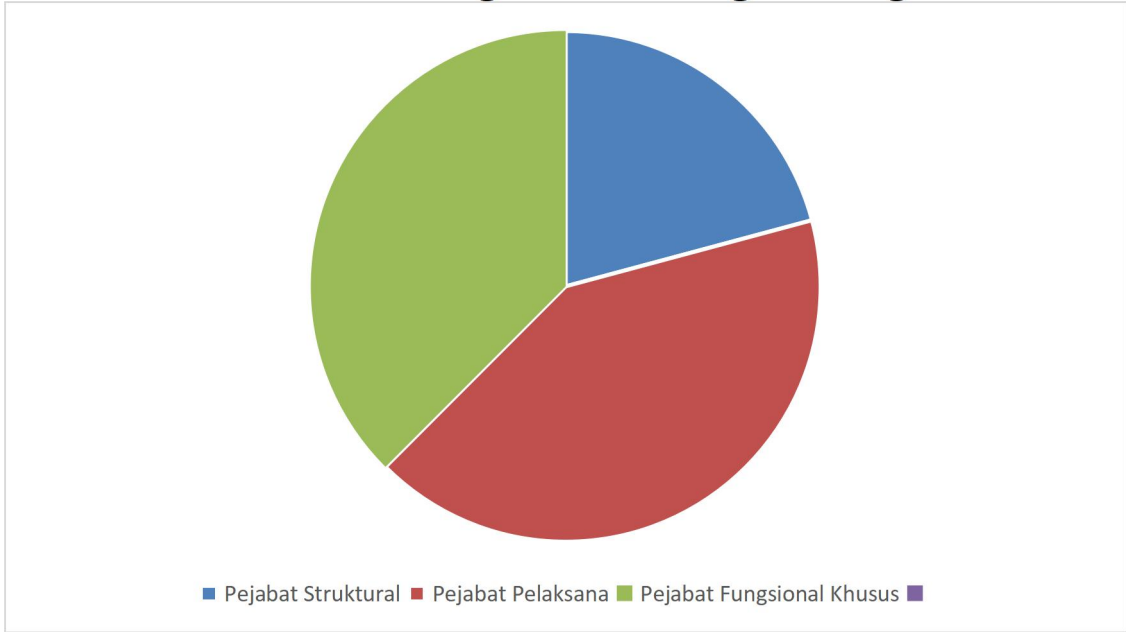
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non structural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.3.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pejabat Struktural	3	2	5	
2	Pejabat Pelaksana	2	8	10	
3	Pejabat Fungsional Khusus	2	7	9	
	Jumlah	7	17	24	

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2022)

Diagram 2.2.3
Pegawai DP3AP2KB Kota Blitar
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang



b.

Gedung yang digunakan Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah di jalan Dr. Sutomo Nomor 50 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat, Gudang Alokon, Sekretariat Bersama KP2A dst. Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Balai Penyuluhan KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.4
Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas P3AP2KB Kota Blitar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil	4	Baik
2	Sepeda Motor	36	Baik
3	Mesin ketik	1	Baik
4	Lemari Arsip	12	Baik
5	Filling Besi	3	Baik
6	Brankas	1	Baik
7	Papan Pengumuman	3	Baik
8	Peta	1	Baik
9	Buffet	1	Baik

10	Kursi	125	Baik
11	Meja	108	Baik
12	Kursi Putar	12	Baik
13	Ac spilt	15	Baik
14	Kipas Angin	2	Baik
15	TV	3	Baik
16	Wireless	1	Baik
17	Kamera	1	Baik
18	Handycame	1	Baik
19	LCD Proyektor	3	Baik
20	Komputer PC	13	Baik
21	Laptop	7	Baik
22	Printer	14	Baik
23	Telepon	7	Baik
24	Layar LCD	2	Baik

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, 2022)

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar didasarkan pada target Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2016-2021. Capaian Pelayanan Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar selama tahun 2016 – 2021, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan			NA	35,64 %	35,77 %	35,90 %	36,02 %	36,15 %	NA	35,77 %	33,02 %	37,99 %	42,17 %	42,17 %	NA	100,36%	92,31%	105,82%	117,07%	116,65%
2	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	71 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	0,88	0,67	0,7	0,64	0,65	0,65	127,87%	145,08%	142,62%	147,54%	146,72%	146,72%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian Indikator Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dikategorikan sangat baik. Namun pada tahun 2016 tidak terdapat target dan realisasi dikarenakan indicator tersebut baru menjadi indicator kinerja utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar mulai tahun 2017. Dengan sebelumnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yang menjadi indicator tujuan renstra yang merupakan indicator sasaran RPJMD Kota Blitar.
2. Capaian Indikator Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga selalu tercapai setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus yang dilaporkan selalu mendapatkan penanganan dan terselesaikan oleh tim.
3. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk juga semakin tahun meningkat capaiannya.

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar
Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas P3A P2KB Kota Blitar	4.036.689.797	4.790.600.409	5.458.831.855	5.228.133.381	5.525.909.069	3.952.256.526	4.648.631.550	5.159.057.259	4.845.142.027	5.233.076.376	97,91 %	97,04 %	94,51 %	92,67 %	94,70 %	0,059	0,064

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. Tren jumlah anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Hal ini menyesuaikan kebutuhan anggaran dan kompleksitas pekerjaan pada Dinas P3P2KB Kota Blitar.
2. Tren realisasi anggaran tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran, sisa lelang, beberapa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena pandemi COVID-19.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta Keluarga Kerencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kerencana.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

2.5.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- Belum adanya peraturan Walikota atau Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan

ekonomi

- Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat
- Masih Adanya Kasus KDRT
- Masih Adanya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- Masih adanya kasus pernikahan dini
- Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur
- Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual (belum memanfaatkan IT)
- Belum adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi

2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- Adanya 21 Organisasi Wanita
- Adanya komunitas pendidikan formal dan informal
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya Panti / Yayasan Sosial
- Adanya lembaga psycology / guru BP
- Adanya Dewan Perwakilan Anak (Forum Anak) Kota Blitar
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kota Blitar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Hasil Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok Fungsi Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya kesenjangan gender	Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender	Belum tersedianya Perda tentang PUG
		Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di ranah public
		Minimnya peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum optimalnya perlindungan anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengendalian penduduk	Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR	Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kontrasepsi kepada pasangan muda
		Belum tersedianya akses informasi pelayanan KB yang mengikuti perkembangan teknologi terkini
		Belum optimalnya Strategi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program pengendalian penduduk dan KB
	Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i>	Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern)
		Belum terintegrasinya Data Keluarga dengan Data - Data Kependudukan lainnya
	Tingginya angka usia pernikahan dini	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja, calon pengantin dan masyarakat kurang optimal
		Belum Optimalnya Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga
	Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Kepesertaan KB pada sasaran khusus utamanya KB Pria (MOP)
		Belum optimalnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengikuti Program KB

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi dan Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan Kota Blitar 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota Blitar seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Penelaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan

program prioritas pada RPJMD yang harus diampu Dinas P3AP2KB sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas P3AP2KB, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas P3AP2KB yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026. Berikut disajikan matrik hasil penelaahan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 :

Tabel 3.2.1
Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat Misi : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter Tujuan : 1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM Sasaran : 1. Menurunnya kesenjangan gender 2. Meningkatnya	Melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	•Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender •Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan •Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak •Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR •Masih Tingginya angka <i>Unmet Need</i> •Tingginya angka usia pernikahan dini •Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	• Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM • Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan • Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak lainnya sehingga perlu meningkatkan penanganannya • Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan • Nilai TFR masih 2,30 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi Jawa Timur	• Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah • Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera • Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Visi / Misi / Program Kerja Wali Kota / Wakil Wali Kota	Tupoksi Dinas P3AP2KB	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
pengendalian penduduk Indikator : 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Program Prioritas Pada RPJMD : • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak • Program Perlindungan Khusus Anak • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota			• Keikutsertaan KB yang cenderung menurun	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan Renstra Kementerian sesuai

dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan pada organisasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga telaah renstra dari kementerian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat visi dan misi sebagai berikut : **VISI** “TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”. **MISI** : Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan.

Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah: Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA KELUARGA KECIL SEJAHTERA”, sedangkan misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diberbagai Bidang Pembangunan,
- b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program Keluarga Berencana yang responsive Gender.

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik Pusat dan Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu :

VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”

Sedangkan MISI adalah :

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan

diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah **“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. **Wisata Kebangsaan;** Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. **Pengembangan sektor pertanian;** pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar.
3. **Pengembangan sektor perdagangan dan jasa;** adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut.
4. **Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;** Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk dihuni, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai SKPD, Dinas P3AP2KB yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan serta Keluarga Berencana sangat mendukung dan mempunyai kontribusi besar untuk mewujudkan Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang pemberdayaan, maka sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah memfasilitasi ruang pemberdayaan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, diperlukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kota Blitar 2021-2026, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditunjukkan dari relevansi isu strategis dengan indikator TPB yang relevan dengan Dinas P3AP2KB adalah isu strategis menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB, Dinas P3AP2KB masuk dalam TPB pilar sosial.

Terdapat 4 (empat) isu dalam pilar sosial di Kota Blitar yaitu kemiskinan, ketahanan pangan dan tingkat kesehatan masyarakat serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi Covid-19. Kecukupan pangan di Blitar menjadi isu strategis akibat lahan pertanian yang semakin menyempit akibat alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Timur;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kesenjangan gender
2. Kelembagaan PUG semakin aktif
3. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
5. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	47,26	47,26	47,28	47,30	47,32	47,35
			Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas P3AP2KB adalah strategi dan kebijakan Dinas P3AP2KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P3AP2KB

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT			
MISI I : Mewujudkan Tata Kehidupan yang religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya kesenjangan gender	Kelembagaan PUG yang aktif	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
			Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter KEREN (keberagaman, religius, nasionalis), Sehat dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengendalian penduduk	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
			Peningkatan kerjasama antar <i>Stakeholders</i> dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
			Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab V, Dinas P3AP2KB Kota Blitar menetapkan program – program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 serta pendanaan disajikan dalam **Tabel 6.1** sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
1	2	4	5		6	7	8	9	10
Menurunnya kesenjangan gender			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,66	67,8		DP3AP2KB	Kota Blitar
	Kelembagaan PUG yang aktif		Persentase kelembagaan PUG aktif		47,25%	47,26%		DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi Jumlah perangkat daerah x 100	100%	100%	869.774.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah perempuan x 100	0,29%	0,33%			
			Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Jumlah perempuan yang terfasilitasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dibagi jumlah perempuan x 100	45,32%	45%			
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan x 100	22,12%	27%	83.484.700	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Penguatan kelembagaan APE	Jumlah peserta Penguatan kelembagaan APE	NA	70 orang	16.219.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta Sosialisasi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah peserta Sosialisasi percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG	NA	55 orang	13.135.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan dan movev PPRG	Jumlah peserta pelatihan dan movev PPRG	NA	88 orang	21.958.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen up dating data gender	Jumlah dokumen up dating data gender	NA	1 dokumen	32.170.800	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	13,89%	13,89%	206.378.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota PEKKA yang mengikuti pelatihan Kue Kering	Jumlah anggota PEKKA yang mengikuti pelatihan Kue Kering	NA	210 orang	80.365.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop Perdamasra	Jumlah perempuan yang mengikuti Workshop Perdamasra	NA	200 orang			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Forum Puspa	Jumlah peserta Forum Puspa	NA	35 orang	126.013.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah peserta Sekolah Perempuan	Jumlah peserta Sekolah Perempuan	NA	100 orang			
			Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS	NA	2 kegiatan			
			Jumlah peserta Workshop peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik	Jumlah peserta Workshop peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik	NA	75 orang			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	2 organisasi	3 organisasi	579.911.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti peningkatan kapasitas anggota organisasi perempuan	NA	39 orang	82.812.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah bingkisan kesejahteraan yang diberikan untuk pengurus GOW Kota Blitar	Jumlah bingkisan kesejahteraan yang diberikan untuk pengurus GOW Kota Blitar	NA	39 paket			
			Jumlah pengurus kesekretariatan GOW Kota Blitar yang terfasilitasi	Jumlah pengurus kesekretariatan GOW Kota Blitar yang terfasilitasi	NA	30 orang			
			Jumlah pengurus GOW yang mengikuti rapat koordinasi pengurus GGOW Kota Blitar	Jumlah pengurus GOW yang mengikuti rapat koordinasi pengurus GGOW Kota Blitar	NA	200 orang			
			Jumlah takjil yang dibagikan dalam bakti sosial bulan Ramadhan	Jumlah takjil yang dibagikan dalam bakti sosial bulan Ramadhan	NA	500 paket			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah anggota PKK yang mengikuti pelatihan ketrampilan	Jumlah anggota PKK yang mengikuti pelatihan ketrampilan	NA	375 orang	413.594.500	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bingkisan yang diberikan kepada pengurus PKK Kota Blitar	Jumlah bingkisan yang diberikan kepada pengurus PKK Kota Blitar	NA	664 paket			
			Jumlah pengurus kesekretariatan PKK yang terfasilitasi	Jumlah pengurus kesekretariatan PKK yang terfasilitasi	NA	35 orang			
			Jumlah takjil yang dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar	Jumlah takjil yang dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar	NA	1000 buah			
			Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat inti	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat inti	NA	250 orang			
			Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat pleno	Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti rapat pleno	NA	420 orang			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan yang terfasilitasi	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan yang terfasilitasi	NA	1500 orang	83.504.300	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan		100%	100%		DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan	100%	100%	319.211.860	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang aktif sosialisasi dibagi jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi	NA	50%	22.427.960	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	36 orang	37 orang	22.427.960	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi jumlah kasus yang tertangani	100%	100%	233.428.500	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Jumlah fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	12 bulan	12 bulan	53.503.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah personil Satgas PPA yang mendapat insentif	Jumlah personil Satgas PPA yang mendapat insentif	44 orang	44 orang			
		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendampingan perempuan korban kekerasan	Fasilitasi pendampingan perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	179.925.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase perempuan yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dibagi jumlah perempuan yang mengikurti sosialisasi	100%	100%	63.355.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Bingkisan Hari Raya Anggota P2TP2A	Jumlah Bingkisan Hari Raya Anggota P2TP2A	NA	35 paket	63.355.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah pertemuan Satgas PPA	Jumlah pertemuan Satgas PPA	NA	3 pertemuan			
			Jumlah pertemuan Anggota P2TP2A	Jumlah pertemuan Anggota P2TP2A	NA	3 pertemuan			
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak	100%	100%		DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah kelembagaan pemenuhan hak anak yang terlibat dibagi jumlah lembaga	100%	100%	91.218.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi dibagi jumlah anak yang terlibat		100%	36.479.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Forum Anak	NA	6 kegiatan	36.479.900	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang menjadi indikator dibagi jumlah lembaga yang terfasilitasi	-	100%	54.738.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta pemilihan Duta Anak	Jumlah peserta pemilihan Duta Anak	NA	100 orang	28.072.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah peserta Gebyar Anak	Jumlah peserta Gebyar Anak	NA	100 orang			
			Jumlah peserta Musrenbang Anak	Jumlah peserta Musrenbang Anak	NA	60 Orang			
			Jumlah Fasilitasi Puspaga	Jumlah Fasilitasi Puspaga	NA	12 Bulan			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak	NA	12 bulan	8.403.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembinaan De Kelana	Jumlah Pembinaan De Kelana	NA	1 kegiatan	18.262.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan yang ditangani	100%	100%	313.266.460	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pencegahan Kekerasan Anak Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi dibagi jumlah lembaga yang diundang		100%	114.508.060	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi PPA	Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi PPA	NA	10 sekolah	82.633.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah peserta Sosialisasi PPA	Jumlah peserta Sosialisasi PPA	NA	30 orang			
			Jumlah media untuk Publikasi PPA (4 Jenis ; Roll Banner Listrik, Siaran Radio, Leaflet, Talkshow - Dialog Interaktif)	Jumlah media untuk Publikasi PPA (4 Jenis ; Roll Banner Listrik, Siaran Radio, Leaflet, Talkshow - Dialog Interaktif)	NA	3 jenis			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan KtPA/TPPO	NA	35 orang	31.874.860	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan dibagi jumlah kasus yang ditangani		100%	156.651.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Anak korban kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Anak korban kekerasan	NA	12 Bulan	156.651.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan dibagi jumlag total lembaga yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas hidup anak		100%	42.106.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Workshop KHA	Jumlah Peserta Workshop KHA	NA	60 orang	42.106.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Jumlah Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	NA	40 orang			
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	A		DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Kriteria standar adalah sesuai dengan Dokumen IKM)		82	4.015.681.681	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun x 100		100%	45.445.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	NA	7 dokumen	12.195.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah	NA	13 dokumen	33.250.000	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan yang tersusun x 100		100%	3.485.942.016	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	28 Orang	28 Orang	3.481.952.016	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang disusun	2 Dok	2 Dok	3.990.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ jumlah pelayanan administrasi perangkat daerah) x 100		100%	39.127.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Event Daerah dan Hari besar Nasuional yang diikuti	Jumlah Event Daerah dan Hari besar Nasuional yang diikuti	2 event	2 event	39.127.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah jenis Publikasi Program/Kegiatan PD	Jumlah jenis Publikasi Program/Kegiatan PD	1 jenis	1 jenis			
			Jumlah sosialisasi perUUan	Jumlah sosialisasi perUUan	4 kali	4 kali			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/ jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah)x 100		100%	167.934.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 jenis	15 jenis	9.248.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	20.457.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dos /kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah Dos /kotak makanan dan minuman yang tersedia	300 Dos	300 Dos	31.513.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang tersedia	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang tersedia	45 Jenis	45 Jenis			
			Jumlah Tumpeng Yang Tersedia	Jumlah Tumpeng Yang Tersedia	15 Buah	15 Buah			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Yang Tersedia	Jumlah jenis Barang Cetak dan Yang Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	21.752.400	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
			Jumlah Lembar Penggandaan	Jumlah Lembar Penggandaan	21 Lembar	21 Lembar			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan Yang Tersedia	Jumlah jenis Bahan Bacaan Yang Tersedia	2 jenis	2 jenis	4.180.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	103 Rakor	103 Rakor	80.783.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/jumlah penyediaan jasa penunjang urusan) x 100		100%	67.782.565	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	NA	12 kali	1.200.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan	9 Rekening	9 Rekening	65.080.165	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Iuran Kebersihan Yang terbayarkan	Jumlah Iuran Kebersihan Yang terbayarkan	12 kali	12 kali	1.502.400	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang trpelihara	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/Jumlah BMD) x 100		100%	209.449.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yag terpelihara	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	4 unit	4 unit	112.244.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan perizinanya	Jumlah kendaraan operasional yang dibayarkan perizinanya	41 unit	41 unit			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	13.307.500	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara	Jumlah bangunan gedung yang terpelihara	3 unit	3 unit	67.410.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara	Jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara	9 jenis	9 jenis	16.488.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rata-rata anak yang dilahirkan selama masa usia subur	2,14	2,14		DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Jumlah data usia kawin dibagi jumlah usia produktif	22,78 th	22,88 th	99.837.200	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah data usia yang diukur	22 th	22,05 th	37.640.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terfasilitasi	NA	4 kelompok	37.640.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Jumlah ketersediaan profil dibagi Jumlah data yang tersedia		100%	62.197.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Tersusunnya Profil Kependudukan dan KB	Jumlah Tersusunnya Profil Kependudukan dan KB	10 dokumen	10 dokumen	29.194.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Rumah Data yang menyediakan data dan informasi keluarga	Jumlah Rumah Data yang menyediakan data dan informasi keluarga	6 Rumah Data	6 Rumah Data	33.003.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah pasangan Usia Subur yang tak ber-KB dibagi Jumlah pasangan usia subur	9,09	9,01	2.990.029.900	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Persentase peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur	74,31	74,32%			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan terfasilitasi dibagi jumlah target terencana		3 kecamatan	419.304.100	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Media KIE Program KKBPK yang Tersedia	Jumlah Media KIE Program KKBPK yang Tersedia		4 Jenis	120.042.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa yang digunakan untuk Promosi Program KB	Jumlah Media Massa yang digunakan untuk Promosi Program KB	2 media	3 media	57.949.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan	Jumlah Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB	6 kegiatan	6 kegiatan	220.644.300	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		KKBPK							
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPIN	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADPIN	150 orang	150 orang	20.668.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang ada	100%	100%	348.996.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Bingkisan Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKBD	Jumlah Bingkisan Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKBD	28 paket	28 paket	348.996.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah Kader KB yang menerima insentif	Jumlah Kader KB yang menerima insentif	345 Orang	345 Orang			
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP dibagi jumlah akseptor KB aktif		50,25%	2.071.762.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Klinik KB yang menerima pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB yang menerima pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	NA	10 Klinik KB	58.825.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor terlayani pada KB MKJP	Jumlah Akseptor terlayani pada KB MKJP	NA	300 akseptor	785.746.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan KB	4 kegiatan	4 kegiatan	1.078.011.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi Program KB	Jumlah peserta monitoring dan evaluasi Program KB	150 orang	200 orang	47.668.600	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta penjangkaran calon akseptor	Jumlah peserta penjangkaran calon akseptor	300 orang	300 orang	50.991.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah akseptor yang terlayani pada pelayanan MOP	Jumlah akseptor yang terlayani pada pelayanan MOP		75 orang	50.520.400	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Awal	2022		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					2020	Target	Rp		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi dibagi jumlah kampung KB yang ada		100%	149.967.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Kegiatan Operasional Integrasi Program KKBPK	6 kampung kb	6 kampung kb	149.967.000	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Prosentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang dibagi jumlah anggota kelompok Tribina & UPPKS	74,31%	74,32%	170.291.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah anggota yang terbina dibagi jumlah total anggota kelompok		100%	170.291.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah peserta Pembinaan BKB	Jumlah peserta Pembinaan BKB	80 orang	80 Orang	98.269.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Jumlah peserta Pembinaan BKL	Jumlah peserta Pembinaan BKL	90 orang	90 Orang			
			Jumlah Peserta Pembinaan BKR	Jumlah Peserta Pembinaan BKR	80 orang	80 Orang			
			Jumlah Peserta Pembinaan Saka Kencana	Jumlah Peserta Pembinaan Saka Kencana	75 orang	75 Orang			
			Jumlah Peserta Pembinaan UPPKA	Jumlah Peserta Pembinaan UPPKA	100 orang	100 Orang			
		Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Peserta Pembinaan PIK R	Jumlah Peserta Pembinaan PIK R	100 orang	100 Orang	48.376.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	NA	2000 orang	23.645.200	DP3AP2KB	Kota Blitar

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUA N	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERENCANAAN								KONDISI AKHIR PADA PERIODE AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAW AB	LOKA SI	
						DAT A AWA L	2023		2024		2025		2026					
						2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
Menurunnya a kesenjangan gender			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,6 6	67,8 7		67,9 4		68		68,0 7		68,0 7		DP3AP2KB	Kota Blitar
	Kelembagaan PUG yang aktif		Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	Persen		47,2 8		47,3		47,3 2		47,3 5		47,3 5		DP3AP2KB	Kota Blitar

		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan x 100	Persen	100	100	969.128.540	100	1.016.548.692	100	1.067.376.129	100	1.120.744.940		4.173.798.301	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	Jumlah perempuan pelaku sektor bisnis dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	NA	0,33		0,33		0,3		0,3				DP3AP2KB	Kota Blitar
			Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Jumlah perempuan pengambil keputusan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100	Persen	45,32	46		47		45		48				DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	Jumlah dokumen ARG yang dianalisis dibagi jumlah kegiatan yang melaksanakan PPRG x 100	Persen		32	87.640.770	37	96.404.482	42	101.134.706	47	106.285.941	47	391.555.899	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi PUG	Dokumen		3	87.640.770	3	96.404.482	3	101.134.706	4	106.285.941	13	391.555.899	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan dibagi jumlah perempuan sektor bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi x 100	Persen		20,53	881.487.770	20,54	920.144.210	20,67	966.241.423	20,73	1.014.458.999	20,73	3.782.332.402	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	Dokumen		7	183.599.246	7	201.959.373	8	212.057.341	8	222.660.208	30	820.276.168	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi		1	75.469.800	1	118.965.000	2	124.913.775	2	131.159.463	6	450.508.038	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	Organisasi		3	325.107.998	3	330.813.420	3	315.742.528	3	319.925.824	12	1.291.589.770	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		21	73.450.166	21	77.125.000	21	80.981.250	21	85.030.312	84	316.586.728	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		614	223.860.560	614	191.281.417	620	232.546.529	620	255.683.192	2468	903.371.698	DP3AP2KB	Kota Blitar

	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan x 100	Persen		100		100		100		100		100		DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen	100	100	326.176.198	100	333.488.753	100	341.166.936	100	349.229.926	100	1.350.061.813	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang aktif sosialisasi dibagi jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi x 100	Persen		100	33.794.029	100	29.664.482	100	22.151.453	100	14.263.668	100	99.873.632	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	33.794.029	2	29.664.482	3	22.151.452	3	14.263.668	10	99.873.632	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus kekerasan pada perempuan x 100	Persen		100	199.604.195	100	201.768.500	100	211.856.925	100	222.449.771	100	835.679.391	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		1	43.249.340	1	45.412.500	1	47.683.125	1	50.067.281	4	186.412.246	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		2	156.354.855	2	156.356.000	2	164.173.800	2	172.382.490	8	649.267.145	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberi pelayanan dibagi jumlah lembaga perlindungan yang tersedia x 100	Persen		100	92.777.974	100	102.055.771	100	107.158.559	100	112.516.487	100	414.508.791	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		110	46.819.298	115	51.501.227	115	54.076.288	120	56.780.102	460	209.176.915	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	45.958.676	2	50.554.544	3	53.082.271	3	55.736.385	10	205331.876	DP3AP2KB	Kota Blitar
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak	Persen		100		100		100		100		100	-	DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembaaan pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dibagi jumlah lembaga hak anak yang tersedia x 100	Persen	100	100	93.954.905	100	96.828.655	100	99.846.093	100	103.014.403	100	393.644.056	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelembaaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Jumlah anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibagi jumlah anak yang terfasilitasi x 100	Persen		100	32.039.770	100	33.641.758	100	35.323.846	100	37.823.846	100	138.829.220	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembaaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembaaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembaaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	32.039.770	2	33.641.758	3	35.323.846	3	37.823.846	10	138.829.220	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam Indikator Kota Layak Anak dibagi jumlah lembaga yang tersedia x 100	Persen		100	61.915.135	100	63.186.897	100	64.522.247	100	65.190.557	100	254.814.836	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak/O rang		100	31.146.670	100	29.341.586	100	28.984.671	110	27.876.102	410	117.349.029	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en		2	30.768.465	2	33.845.311	3	35.537.576	3	37.314.455	6	137.465.807	DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen	100	100	319.503.465	100	326.052.320	100	332.928.618	100	340.148.731	100	1.318.633.134	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	Jumlah lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen		100	156.671.007	100	172.338.107	100	180.955.012	100	190.002.762	100	699.966.888	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en		5	156.671.007	5	172.338.107	6	180.955.012	6	190.002.762	22	699.966.888	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	Jumlah anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus dibagi jumlah kasus anak korban kekerasan x 100	Persen		100	72.047.760	100	53.851.046	100	47.117.281	100	40.046.828	100	213.062.915	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		2	72.047.760	2	53.851.046	2	47.117.281	2	40.046.828	8	213.062.915	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibagi jumlah lembaga tersedia x 100	Persen		100	90.784.698	100	99.863.167	100	104.856.325	100	110.099.141	100	405.603.331	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		2	90.784.698	2	99.863.167	3	104.856.325	3	110.099.141	10	405.603.331	DP3AP2KB	Kota Blitar
Meningkatnya pengendalian penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	0,67	0,67		0,67		0,65		0,65		0,65		DP3AP2KB	Kota Blitar
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	Indeks		2,13		2,12		2,12		2,11		2,11		DP3AP2KB	Kota Blitar

		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Nilai rata-rata usia kawin pertama	Persen	22,78	23,0 ₁	104.829.06 ₀	23,3 ₅	110.070.51 ₃	23,7 ₅	115.574.03 ₉	24,0 ₁	121.352.74 ₁	24,0 ₁	451.826.35 ₃	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Nilai tengah Usia Kawin Perempuan	Tahun		22,2 ₅	79.500.386	22,5	87.450.424	22,7 ₅	91.822.944	23	96.414.092	23	355.187.846	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		1	24.999.936	1	27.499.929	1	28.874.925	1	30.318.672	4	111.693.462	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan		3	54.500.450	5	59.950.495	5	62.948.019	7	66.095.420	20	243.494.384	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	Jumlah profil kependudukan yang tersedia dibagi jumlah profil kependudukan yang dianalisis x 100	Persen		100	25.328.670	100	22.620.085	100	23.751.095	100	24.938.645	100	96.638.495	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		1	5.065.734	1	4.524.017	1	4.750.219	1	4.987.729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen		6	5.065.734	6	4.524.017	7	4.750.219	8	4.987.729	27	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen		1	5.065.734	1	4.524.017	2	4.750.219	2	4.987.729	6	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan		1	5.065.734	1	4.524.017	1	4.750.219	1	4.987.729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah laporan hasil pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan		1	5.065.734	1	4.524.017	1	4.750.219	1	4.987.729	4	19.327.699	DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Perhitungan cakupan PUS	Indeks	9,09	8,98	3.139.531.395	8,55	3.296.507.965	8,25	3.461.333.363	8,01	3.634.400.031	8,01	13.531.772.754	DP3AP2KB	Kota Blitar
			Persentase KB Aktif	Jumlah pengguna KB aktif dibagi jumlah penduduk Usia Subur x 100	Persen	74,31	74,35		74,4		74,46	74,67		74,67			DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Kecamatan		3	821.485.455	3	727.534.334	3	880.211.010	3	909.221.564	3	3.338.452.363	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Organisasi		1	90.271.086	1	35.246.100	1	92.441.729	1	94.563.819	4	312.522.734	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen		1	111.324.200	1	57.982.685	1	116.315.147	1	119.630.904	4	405.252.936	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen		4	157.445.042	4	108.715.611	5	169.584.719	5	175.563.955	18	611.309.327	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan		6	129.273.577	6	150.715.769	8	141.584.883	8	146.164.127	28	567.738.356	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		4	210.992.773	4	236.284.782	5	231.432.348	5	240.503.966	18	919.213.869	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		3	122.178.777	3	138.589.387	5	128.852.184	5	132.794.793	16	522.415.141	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	Jumlah IMP yang terfasilitasi dibagi jumlah IMP yang tersedia x 100	Persen		100	454.292.292	100	503.914.253	100	512.443.293	100	535.565.457	100	2.006.215.295	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		359	454.292.292 ₂	359	503.914.253 ₃	360	512.443.293 ₃	360	535.565.457 ₇	1438	2.006.215.295 ₂₉₅	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Baru MKJP yang terfasilitasi dibagi jumlah capaian peserta KB Baru yang tersedia x 100	Persen		50,3 5	1.460.557.437	50,4 5	1.640.155.368	50,5 6	1.588.829.755	50,7 6	1.648.271.240	50,7 6	6.337.813.800	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		25	97.300.669	25	111.233.468	25	100.117.969	26	102.623.867	101	411.265.973	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang		1	101.502.577	2	115.845.567	2	104.971.173	3	107.719.731	8	430.039.048	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		12	315.114.997	14	350.819.559	16	351.693.864	18	366.778.557	60	1.384.406.977	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit		13	453.052.577	15	502.550.567	17	511.011.423	20	534.061.994	20	2.000.676.561	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang		150	135.563.335	155	153.312.400	155	144.311.347	160	149.026.914	620	582.213.996	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		3		97.164.727	3		111.073.932	5		99.960.956	5		102.459.003	16		410.658.618	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		12		98.612.928	12		112.666.953	14		101.633.628	14		104.215.309	52		417.128.818	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang		150	162.245.627		150	182.662.922	155	175.129.395	155	181.385.865	610	701.423.809		DP3AP2KB		Kota Blitar		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	Jumlah Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB dibagi jumlah Kampung KB yang tersedia x 100	Persen		100	403.196.211		100	424.904.010	100	479.849.305	100	541.341.770	100	1.849.291.296		DP3AP2KB		Kota Blitar		
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung		6	199.003.646		6	218.904.010	6	229.849.305	6	241.341.770	6	889.098.731		DP3AP2KB		Kota Blitar		

		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen pelaksanaan integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Dokumen		1	204.192.565	1	206.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	960.192.565	DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota kelompok Tribina dan UPPKS dibagi jumlah anggota yang ber-KB x 100	Persen	74,31	74,35	178.805.760	74,4	187.746.048	74,46	197.133.350	74,67	206.990.018	74,67	770.675.176	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	Jumlah kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang mendapat fasilitas dibagi jumlah kelompok Tribina, UPPKS dan Saka x 100	Persen		100	178.805.760	100	187.746.048	100	197.133.350	100	206.990.018	100	770.675.176	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		6	36.125.802	6	36.682.092	8	40.622.092	8	42.622.092	28	156.052.078	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok		1	52.579,088	1	55.579,088	2	58.580.000	2	60.580.000	2	227.318.176	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan		1	46.600.870	1	49.600.000	2	50.931.258	2	53.197.926	6	200.330.054	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan		13	43.500.000	20	45.884.868	20	47.000.000	20	50.590.000	73	186.974.868	DP3AP2KB	Kota Blitar
Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		A / 83		A / 84		A / 84		A / 84,5		A / 84,5	-	DP3AP2KB	Kota Blitar
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		Baik / 83	3.995,517.53 ₈	Baik / 84	4.256.749.15 ₅	Baik / 84	4.469.586.55 ₈	Baik / 84,5	4.693.065.93 ₈	Baik / 84,5	17.414.919.1 ₈₉	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia x 100	Persen		100	39.546.095	100	49.278.388	100	51.742.307	100	54.329.422	100	194.896.212	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7	8.620.095	7	10.741.500	7	11.278.575	7	11.842.503	28	42.482.673	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		13	30.926.000	13	38.536.888	13	40.463.732	13	42.486.919	52	152.413.539	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	Persen		100	3.242.215.447	100	3.404.302.705	100	3.574.517.840	100	3.753.243.732	100	13.974.279.724	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		24	3.238.593.047	24	3.400.522.705	24	3.570.548.840	24	3.749.076.282	24	13.958.740.874	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2	3.622.400	2	3.780.000	2	3.969.000	2	4.167.450	8	15.538.850	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia x 100	Persen		100	76.265.230	100	93.181.476	100	97.840.549	100	102.732.577	100	370.019.832	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		33	34.685.230	33	41.622.276	33	43.703.389	33	45.888.559	33	165.899.454	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		99	41.580.000	99	51.559.200	99	54.137.160	99	56.844.018	297	204.120.378	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum sesuai standar dibagi jumlah ketersediaan administrasi umum x 100	Persen		100	178.985.361	100	197.801.033	100	207.691.083	100	218.075.637	100	802.553.114	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	8.588.881	1	9.030.000	1	9.481.500	1	9.955.575	4	37.055.956	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	16.780.153	5	18.458.168	5	19.381.076	5	20.350.130	20	74.969.527	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	13.55 1.207	4	16.12 8.000	4	16.93 4.400	4	17.78 1.120	16	64.39 4.727	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6	9.183. 500	6	10.10 1.850	6	10.60 6.942	6	11.13 7.289	24	41.02 9.581	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	17.533. 670	1	18.564. 000	1	19.492. 200	1	20.466. 810	4	76.056. 680	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokum en		24	5.400.000	24	6.480.000	24	6.804.000	24	7.144.200	96	25.828.200	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n		60	104.985. 250	60	115.483. 775	60	121.257. 963	60	127.320. 861	240	469.047. 849	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en		1	2.962.700	1	3.555.240	1	3.733.002	1	3.919.652	4	14.170.594	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah penyediaan BMD yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD tersedia x 100	Persen		100	7.824.000	100	12.780.000	100	13.419.000	100	14.089.950	100	48.112.950	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	7.824. 000	1	12.78 0.000	1	13.41 9.000	1	14.08 9.950	4	48.11 2.950	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart dibagi jumlah jasa penunjang yang tersedia x 100	Persen		100	257.019.845	100	285.477.837	100	299.751.728	100	314.739.314	100	1.156.988.72 4	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n		1	1.199. 680	1	1.319. 648	1	1.385. 630	1	1.454. 911	4	5.359. 869	DP3AP2KB	Kota Blitar

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		36	55.120.165	36	63.388.189	36	66.557.598	36	69.885.478	144	254.951.430	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		2	200.700.000	2	220.770.000	2	231.808.500	2	243.398.925	8	896.677.425	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jumlah BMD yang terpelihara dibagi jumlah BMD yang tersedia x 100	Persen		100	193.661.560	100	213.927.716	100	224.624.051	100	235.855.306	100	868.068.633	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		41	106.448.960	41	117.093.856	41	122.948.548	41	129.095.976	164	475.587.340	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		42	26.202.600	42	28.822.860	42	30.264.003	42	31.777.203	168	117.066.666	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	60.010.000	1	66.011.000	1	69.311.500	1	72.777.127	4	268.109.627	DP3AP2KB	Kota Blitar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	1.000.000	3	2.000.000	3	2.100.000	3	2.205.000	12	7.305.000	DP3AP2KB	Kota Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator tujuan Renstra	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	67,66	67,80	67,87	67,94	68,00	68,07	68,07
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,65	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif dibagi Jumlah Kelembagaan PUG dikali 100	47,25	47,26	47,28	47,30	47,32	47,35	47,35
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir period RPJMD
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di kali 100							
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Persen	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	2,14	2,14	2,13	2,12	2,11	2,11	2,11

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB tahun 2021-2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan dan aturan yang mendasari perubahan rencana pembangunan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021 – 2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)

8.2 Kesimpulan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Dinas P3AP2KB Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan

tujuan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Selanjutnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.